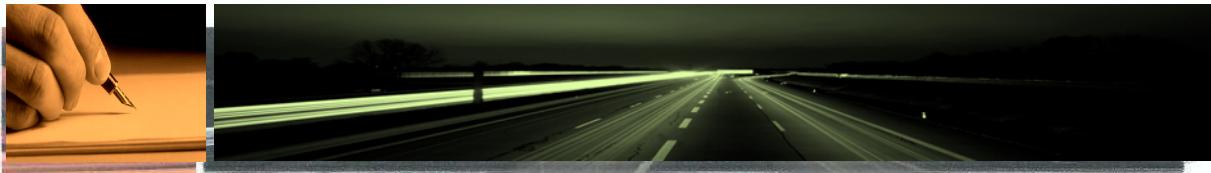




ur

INSPEKTORAT PERUBAHAN RENCANA KERJA 2019





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kami menyadari di dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini dapat menjadikan acuan kerja kami selama 1 tahun ke depan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Sidoarjo, 08 Agustus 2019

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HELMY PERDANA PUTERA, Drs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019.....	7
2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019.....	7
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Tujuan dan Sasaran	15
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 (Tabel 3.1) ...	18
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019	26
BAB IV. PENUTUP	34



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan II	88
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra 2014 - 2019	16
Tabel 3. 2. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra 2019-2024	17
Tabel 3. 3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019.....	18
Tabel 3. 4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019	27



I

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 050/1730/201/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renja perangkat Daerah merupakan penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang lebih detail dari rencana strategis 5 tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renja disusun sebagai pedoman kerja selama 1 tahun. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mempunyai Visi **“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance menuju clean government di Jawa Timur”** dengan Misi **“Melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur secara profesional, obyektif, dan akuntabel.”**



Namun demikian, pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami masa transisi Perubahan pada arah kebijakan Visi dan Misi Gubernur yang lama dengan RPJMD Tahun 2014 – 2019 ke Perubahan Gubernur baru yang terpilih dengan RPJMD Tahun 2019–2024.

Oleh sebab itu diperlukan Perencanaan yang saling berkesinambungan dan dapat mengakomodir antara kebijakan Gubernur yang lama ke Gubernur yang baru dengan visi yaitu **Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong**, kemudian dijabarkan ke dalam Misi yang baru yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, novatif, Terbuka,Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan**.

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tetap dikawal dan dijaga untuk mewujudkan *good governance* menuju *clean government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, yang didasarkan atas capaian/realisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 serta proyeksi capaian hingga triwulan I tahun anggaran 2018 yang disesuaikan dengan perubahan kondisi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anggaran serta kondisi lainnya.



Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Perubahan Tahun 2019;
2. Sebagai dasar untuk menentukan target capaian pada anggaran Perubahan Tahun 2019;
3. Sebagai pedoman arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan pada Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Bab II Evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan II Tahun 2017

Bab ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2017, prakiraan capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2018 (periode Januari s.d. Maret 2018), dan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat, yang diharapkan akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Disamping itu juga dijabarkan review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2019 yang dirinci pada Tabel 3.1.



Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

II

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Perubahan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 merupakan target tahun ke-5 dari Periode Renstra tahun 2014-2019. Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 Triwulan II, realisasi pada beberapa program/kegiatan ada yang telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, dan ada juga yang belum tercapai. Terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak 100%. Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019 Triwulan II dan prakiraan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan II

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih terdapat pelaksanaan yang belum optimal, antara lain kegiatan sosialisasi SOP masih 0%, disebabkan karena s/d. Triwulan II berakhir, SOP masih disusun oleh tim penyusun SOP Pembinaan dan Pengawasan reguler Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



3.1. Tujuan dan Sasaran

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Namun demikian pada dokumen Perubahan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur terjadi transisi antara Gubernur Lama dengan Gubernur yang Baru. Sehingga Dokumen ini juga tetap harus mengakomodir Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan 2019- 2024. Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target selama 5 Tahun, yang akan disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra 2014 - 2019

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi awal 2014	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kelancaran administrasi dan operasional instansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Terarahnya kinerja instansi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, monitoring, dan pelaporan/ evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	Persentase ketataan terhadap peraturan perundang-undangan daerah oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	70%	70%	70%	75%	75%	75%
2	Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih		Meningkatnya Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur	Peringkat Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur	5,7	5,7	5,8	5,9	6	6,1

Tabel 3. 2. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2018	Target						kondisi akhir 2024
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	81,7	85,7	90,01	90,51	91,51	92,51	93,01	93,01
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
		Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	76,09	77	77	78	79	80	81	81

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 (Tabel 3.1)

Berikut ini akan disajikan tabel 3.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019.

Tabel 3. 3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Kode		Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan						
		Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100	2.474.589.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100	2.474.589.000		
	019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	Jawa Timur	<i>Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran</i>	100	2.474.589.000	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	Jawa Timur	<i>Skor Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	2.474.589.000		
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Jawa Timur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	4.003.631.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jawa Timur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	4.003.631.000		

Kode		Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan						
		Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting	
		012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	1 paket	2.683.600.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Skor Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1 paket	2.683.600.000	
		031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	1 paket	1.320.031.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	Skor Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana & Prasarana	1 paket	1.320.031.000	
		07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100	112.200.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100	112.200.000	
		001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Konsultasi	15 kali	18.470.000	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Konsultasi	15 kali	18.470.000	

Kode			Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting
		002	<i>Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal</i>	200 pegawai	82.200.000		Jawa Timur	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal</i>	200 pegawai	82.200.000	
		08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jawa Timur	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	190.880.000	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jawa Timur	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	190.880.000	
		001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>	1 dok	24.930.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>	1 dok	24.930.000	
		002	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun</i>	1	5.400.000	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun</i>	1	5.400.000	
		003	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Database yang diupdate secara berkala</i>	1	154.950.000	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Database yang diupdate secara berkala</i>	1	154.950.000	

Kode			Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting
		004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	1	5.600.000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	1	5.600.000	
		20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jawa Timur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	75	3.367.598.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jawa Timur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	75	3.367.598.000	
		008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	36 Dok	1.798.593.000	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	36 Dok	1.798.593.000	
		012	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jawa Timur	Jumlah Peraturan Kebijakan Pengawasan	2 dok	1.569.005.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jawa Timur	Jumlah Peraturan Kebijakan Pengawasan	2 dok	1.569.005.000	
		21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 orang	832.070.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 rang	832.070.000	

Kode			Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan					
			Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting
		001	<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan</i>	11 kali	832.070.000	<i>Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan</i>	11 kali	832.070.000	
		22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	12 buah	37.050.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	12 buah	37.050.000	
		002	<i>Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan</i>	2 dok	37.050.000	<i>Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan</i>	2 dok	37.050.000	
		79	Program Pencegahan Korupsi	Jawa Timur	Penilaian WBK dan WBBM	10 PP	2.110.525.000	Program Pencegahan Korupsi	Jawa Timur	Penilaian WBK danWBBM	10 PP	2.110.525.000	
		001	<i>Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Perangkat Daerah dengan status Zona Integritas Bebas dari Korupsi</i>	5.8	2.110.525.000	<i>Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Perangkat Daerah dengan status Zona Integritas Bebas dari Korupsi</i>	5.8	2.110.525.000	

Kode				Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan					
				Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting
		92		Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Jawa Timur	Persentase Kerugian Daerah	4 PD	18.750.075.000	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Jawa Timur	Persentase Kerugian Daerah	4 PD	18.750.075.000	
		001		<i>Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah obrik dengan status WTP dari BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>125 obrik</i>	<i>10.860.550.000</i>	<i>Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT</i>	Jawa Timur	<i>Obyek Pemeriksaan</i>	<i>125 obrik</i>	<i>10.860.550.000</i>	
		002		<i>Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler</i>	Jawa Timur	<i>Obyek Pemeriksaan</i>	<i>116</i>	<i>4.893.050.000</i>	<i>Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler</i>	Jawa Timur	<i>Obyek Pemeriksaan</i>	<i>116</i>	<i>4.893.050.000</i>	
		003		<i>pemeriksaan tujuan tertentu</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>255.700.000</i>	<i>pemeriksaan tujuan tertentu</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>255.700.000</i>	
		004		<i>pemeriksaan khusus</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>366.400.000</i>	<i>pemeriksaan khusus</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>366.400.000</i>	
		005		<i>pemeriksaan kasus</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan Kasus yang</i>	<i>10 kali</i>	<i>759.650.000</i>	<i>pemeriksaan kasus</i>	Jawa Timur	<i>Jumlah Pemeriksaan Kasus yang</i>	<i>10 kali</i>	<i>759.650.000</i>	

Kode		Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisa Kebutuhan					
		Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Cat Penting
				dilaksanakan					dilaksanakan			
		006	review laporan keuangan	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan	55 PD	487.250.000	review laporan keuangan	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan	55 PD	487.250.000
		007	evaluasi LPPD	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi LPPD	55 PD	980.525.000	evaluasi LPPD	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi LPPD	55 PD	980.525.000
		008	Evaluasi LAKIP	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	55 PD	140.350.000	evaluasi LAKIP	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	55 PD	140.350.000
		009	Telaah sejawat hasil pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Reviu LHP	12 kali	6.600.000	telaah sejawat hasil pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Reviu LHP	12 kali	6.600.000
				TOTAL		43.117.950.125			TOTAL		43.117.950.125	

Pada Perubahan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini terdapat beberapa perubahan pagu anggaran pada program/kegiatan antara lain terdapat pada :

1. Terdapat usulan tambahan pagu pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi . Tambahan pagu ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar.
2. Terdapat usulan tambahan pagu pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Konsultasi kepada OPD (Coaching Clinic)
 - b. Kegiatan Survey penilaian Integritas Kerjasama KPK RI dengan BPS Jawa Timur.
 - c. Kegiatan Rakorwasda Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jatim 38 kab/kota
 - d. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif antara APIP dan APH
3. Terdapat usulan tambahan pagu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Pelaksanaan Administrasi perkantoran yang digunakan untuk penambahan honor PTT sebanyak 12 orang.
4. Terdapat usulan tambahan pagu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang digunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta untuk Biaya Perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
5. Terdapat usulan tambahan pagu pada Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja yang digunakan untuk :
 - a. Pemeriksaan Khusus.
 - b. Pemeriksaan Kasus.
 - c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019

Berikut ini terdapat perbandingan pagu anggaran program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada saat sebelum dan setelah perubahan anggaran, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2019

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100	Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100	Jawa Timur	2.385.874.000	2.474.589.000	bertambah	PAP BD
	019	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran</i>	<i>100 %</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Skor Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100 %</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>2.385.874.000</i>	<i>2.474.589.000</i>	<i>bertambah</i>	<i>PAP BD</i>
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	1 Paket	Jawa Timur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	1 paket	Jawa Timur	2.290.045.000	4.003.631.000	bertambah	PAP BD
	012	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>1.164.444.000</i>	<i>2.683.600.000</i>	<i>bertambah</i>	<i>PAP BD</i>

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana	
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	1 Paket	Jawa Timur	1.125.596.000	1.320.031.000	bertambah	PAP BD
	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	Jawa Timur	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100	Jawa Timur	199.389.000	112.200.000	berkurang	PAP BD
		001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	15	Jawa Timur	Jumlah Konsultasi	15	Jawa Timur	30.000.000	30.000.000	tetap	PAP BD
		002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jawa Timur	Percentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jawa Timur				
				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	200 pegawai	Jawa Timur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	200 pegawai	Jawa Timur	169.389.000	82.200.000	berkurang	
	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Percentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100	Jawa Timur	Percentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100	Jawa Timur	199.540.000	190.880.000	berkurang	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Jawa Timur	39.940.000	24.930.000	berkurang	PAP BD
	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	1 dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	1	Jawa Timur	16.720.000	5.400.000	berkurang	PAP BD
	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database pd	1 apket	Jawa Timur	Jumlah update database pd	1 paket	Jawa Timur	13.300.000	154.950.000	bertambah	PAP BD
	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	1 dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	1 dok	Jawa Timur	129.580.000	5.600.000	berkurang	PAP BD
	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	70	Jawa Timur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	70	Jawa Timur	3.548.110.000	3.367.598.000	berkurang	PAP BD

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana	
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	36 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	36 Dok	Jawa Timur	1.738.593.000	1.798.593.000	bertambah	PAP BD
		012	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen Kebijakan Pengawasan	2 dok	Jawa Timur	Dokumen Kebijakan Pengawasan	2 dok	Jawa Timur	1.809.810.000	1.569.005.000	berkurang	PAP BD
	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 orang	Jawa Timur	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 orang	Jawa Timur	629.140.000	832.070.000	bertambah	PAP BD
		001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	11 kali	Jawa Timur	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	11 kali	Jawa Timur	629.140..000	832.070.000	bertambah	PAP BD
	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	12	Jawa Timur	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	12	Jawa Timur	37.050.000	7.410.000	berkurang	PAP BD

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana	
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	2	Jawa Timur	Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan	2	Jawa Timur	37.050.000	7.410.000	berkurang	PAP BD
	79		Program Pencegahan Korupsi	Penilaian WBK- WBBM	10	Jawa Timur	Penilaian WBK- WBBM	10	Jawa Timur	2.110.525.000	4.909.770.000	bertambah	PAP BD
		001	Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Perangkat Daerah dengan status Zona Integritas Bebas dari Korupsi	5.8	Jawa Timur	Jumlah Perangkat Daerah dengan status Zona Integritas Bebas dari Korupsi	5.8	Jawa Timur	2.110.525.000	4.909.770.000	bertambah	PAP BD
	92		Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Kerugian Daerah	1.1	Jawa Timur	Persentase Kerugian Daerah	1.1	Jawa Timur	9.402.300.000	18.750.075.000	bertambah	PAP BD
		001	Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT	Jumlah obrik dengan status WTP dan BPK telah memolahkukan kesda	125 obrik	Jawa Timur	Obyek Pemeriksaan	125	Jawa Timur	9.402.300.000	10.860.550.000	bertambah	PAP BD

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana	
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler</i>	<i>Obyek Pemeriksaan</i>	<i>116 obrik</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Obyek Pemeriksaan</i>	<i>116 oblik</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>5.187.850</i>	<i>4.893.050.000</i>	<i>bertambah</i>	<i>PAP BD</i>	
		003	<i>pemeriksaan tujuan tertentu</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan yang Dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>289.700.000</i>	<i>255.700.000</i>	<i>berkurang</i>	<i>PAP BD</i>
		004	<i>pemeriksaan khusus</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>256.955.000</i>	<i>366.400.000</i>	<i>bertambah</i>	<i>PAP BD</i>
		005	<i>pemeriksaan kasus</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan</i>	<i>10 kali</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>289.950.000</i>	<i>759.650.000</i>	<i>bertambah</i>	<i>PAP BD</i>
		006	<i>review laporan keuangan</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>575.130.000</i>	<i>487.250.000</i>	<i>berkurang</i>	<i>PAP BD</i>
		007	<i>evaluasi LPPD</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi LPPD</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi LPPD</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>1.081.045.000</i>	<i>980.525.000</i>	<i>berkurang</i>	<i>PAP BD</i>
		008	<i>evaluasi LAKIP</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi</i>	<i>55 PD</i>	<i>Jawa Timur</i>	<i>165.850.000</i>	<i>140.350.000</i>	<i>Berkurang</i>	<i>PAP BD</i>

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran sebelum perubahan		Lokasi	Indikator Capaian Program/ Indikator Keluaran setelah perubahan		Lokasi Perubahan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sum ber Dana	
			Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		009	telaah sejawat hasil pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Reviu LHP	12 kali	Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Reviu LHP	12	Jawa Timur	1.040.605.000	6.600.000	berkurang	PAP BD
							TOTAL			31.878.618.000	43.117.950.125		

BAB IV. PENUTUP



Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Perubahan Renja Tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 08 Agustus 2019

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HELMY PERDANA PUTERA, Drs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630325 198903 1 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT